

SKRIPSI

PROSPEK PEMULIHAN KESEPAKATAN NUKLIR 5P+1 ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN IRAN



**SRY WULANDARI
F0218328**

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah kesepakatan nuklir Iran dengan negara 5P+1 yang disepakati pada tahun 2015 pasca keluarnya Amerika Serikat pada tahun 2018 dibawah pemerintahan presiden Donald Trump. Sejalan dengan itu peneliti akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana peluang dan tantangan pemulihan kesepakatan nuklir Iran pada era presiden Joe Biden. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri, Rezim Internasional, dan *Nuclear Deterrence* untuk membantu menghubungkan dengan fakta yang diperoleh mengenai tindakan Amerika Serikat menyikapi program nuklir Iran. Peneliti memperoleh data menggunakan *library reseach* yaitu memperoleh data melalui studi pustaka kemudian analisis data menggunakan metode kualitatif dalam menggambarkan fakta yang ada. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya dan tantangan pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015. Peluang pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015 pada era presiden Joe Biden antara lain kembalinya pembicaraan kesepakatan nuklir Iran ke meja perundingan, dukungan dan desakan dari negara 5P+1 untuk ke kembali pada kesepakatan, dan adanya kerjasama baru antara IAEA dan Iran disamping itu tantangan terhadap pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015 adalah adanya dukungan Israel sebagai sekutu Amerika Serikat di kawasan timur tengah untuk tidak kembali pada kesepakatan nuklir Iran 2015, syarat yang diberikan Iran diluar dari cakupan pembicaraan, adanya ketergantungan Rusia terhadap Iran dalam membantu perang ukraina dan kurangnya kepercayaan Iran terhadap pemerintahan baru Amerika Serikat.

Kata Kunci : Amerika Serikat, Iran, Nuclear Deterrence, JCPOA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah internasional yang penting dikaji adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kesepakatan nuklir. Kesepakatan nuklir merupakan cara yang di tempuh untuk meminimalisir produksi nuklir di dunia. Sejak perang dunia II nuklir dikembangkan oleh negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat untuk kepentingan militernya. Teknologi nuklir saat ini bukan hanya dikembangkan oleh satu negara saja, akan tetapi banyak negara yang memproduksi nuklir untuk kepentingan nasionalnya. Upaya untuk menekan tingginya uji coba nuklir sudah dilakukan sejak tahun 1940-an karena tingginya pengembangan nuklir diberbagai belahan dunia telah menimbulkan ancaman dan kekhawatiran terhadap keamanan.¹

Upaya untuk mengontrol laju produksi nuklir di berbagai negara telah diusahakan dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perang nuklir. Nuklir yang diketahui merupakan senjata pemusnah massal ini dinilai sangat penting untuk dibatasi produksinya, namun disisi lain ada alasan tersendiri mengapa negara yang bersangkutan memproduksi senjata mematikan tersebut. Tiga alasan mengapa suatu negara berupaya untuk memiliki nuklir. Ketiga alasan

¹Yustiningrum, E.RR. (2017).” *Masalah Senjata Nuklir Dan Masa Depan Perdamaian Dunia*”, Jurnal Politik, Volume 7, hlm 6.

tersebut adalah alasan strategi, politik dan prestis.² Kepemilikan senjata nuklir di suatu negara dianggap sebagai penunjang di berbagai aspek, dari segi strategi, senjata nuklir dinilai sangat penting untuk menjaga keamanan suatu negara dari serangan musuh. Sedangkan dari segi politik dan prestis bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dengan negara lain.

Berbicara tentang manfaat suatu negara untuk mengembangkan teknologi nuklir, di sisi lain kepemilikan teknologi nuklir ini dinilai mengancam keamanan negara lain. Contohnya adalah salah satu negara yang letaknya di Timur Tengah yaitu Iran yang mengembangkan teknologi-teknologi nuklir untuk kepentingan negaranya, yaitu dengan mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi.³ Dilihat dari sejarah, Amerika Serikat dan Iran awalnya adalah kedua negara yang mempunyai kerjasama yang baik dalam program nuklir. Namun pada pertengahan tahun 1970-an kekhawatiran AS mulai muncul Amerika Serikat mulai mengkhawatirkan pengembangan nuklir Iran digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal.⁴ Amerika Serikat yang menganggap Iran sebagai ancaman bagi keamanan dan juga menganggap Iran sebagai hambatan untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat di kawasan sehingga Amerika Serikat menerapkan berbagai strategi kebijakan untuk menekan Iran.⁵

² Purwanto,A.J. (201) *”Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional”* Jurnal Ilmu Politik dan Hubungan Internasional,Vol 42, hlm 4.

³ Karima, I. (2018) *” Pendatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) oleh Iran tahun 2015”* Jurnal analisis, Vol 7, hlm 238.

⁴ Mikail, K, & Fhathoni, A. (2019). *“Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Iran”* Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol 3, hlm 8.

⁵ Kurniadi, A. (2016). *Kesepakatan Amerika Serikat Menyetujui Joint Plan Of Action (JCPOA) Dengan Iran Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran 2015*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm 45.

Pada tahun 2015 presiden Barack Obama memulai awal yang baru untuk memperbaiki hubungan dengan Iran. Hubungan yang baik itu mulai terlihat ditandai dengan penyelenggaraan kesepakatan JCPOA yang ditandatangani Iran dan negara 5P+1 (AS, Inggris, Perancis, Cina, Rusia dan Jerman) Kesepakatan nuklir yang melalui negosiasi yang panjang itu baru terealisasi pada tahun 2015, dengan berbagai pertimbangan dan menguntungkan pihak-pihak yang terkait. Isi dari kesepakatan tersebut adalah Iran akan mengurangi aktivitas program nuklirnya dan membuka kebebasan bagi badan pengawas internasional untuk mengontrol program nuklirnya.⁶ Kesepakatan JCPOA telah disepakati pada tanggal 14 juli 2015. *Adoption Day* atau hari diberlakukannya kesepakatan JCPOA pada tanggal 18 oktober 2015 dan pada tanggal 16 januari 2016 dikenal sebagai hari *Implementation Day* setelah diumumkan oleh IAEA bahwa Iran telah mematuhi kesepakatan nuklir.⁷

Namun pada tahun 2018 setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, setelah pergantian pemerintahan dari Barack Obama ke pemerintahan Donald trump Amerika Serikat menyatakan keluar dari perjanjian kesepakatan nuklir tersebut. Kebijakan luar negeri AS tentang pengembangan nuklir Iran berubah ketika terjadi peralihan pemerintahan. Amerika Serikat menyatakan keluar dari kesepakatan nuklir Iran. Pemerintahan suatu negara bersumber dari internal,

⁶ Hengkey, S.C. (2021). "Diplomasi Amerika Serikat Tentang Perjanjian Nuklir Dalam Pembentukan *Joint Comprehensive Plan Of Action* Dengan Iran Tahun 2013-2015" Jurnal Hubungan Internasional, Vol 9, hlm 114.

⁷ Garjito, M.C.F. (2019). "Analisis Kasus Keputusan Presiden Donald Trump Keluar Dari JCPOA" Jurnal hubungan internasional, Vol 7, hlm 5.

pengalaman dan latar belakang kepribadian pemerintahan.⁸ karena Donald Trump menganggap kesepakatan JCPOA tidak efektif dan justru menghambat Amerika Serikat untuk menghilangkan rezim Iran dengan adanya keringanan sanksi sehingga Donald Trump kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.⁹ Pada masa pemerintahan Donald Trump hubungan Amerika Serikat dan Iran memulai hubungan yang harmonis lagi.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan presiden Donald Trump, diharapkan hubungan kedua negara tersebut kembali membaik dibawah pemerintahan presiden Joe Biden. Kebijakan luar negeri Joe Biden diharapkan membawa dampak yang baik, dengan menarik kembali AS ke kesepakatan nuklir 2015 dan membatasi kembali Iran agar tidak melanggar batasan nuklir sesuai perjanjian.

Penelitian ini penulis akan berfokus pada upaya dan tantangan apa saja yang dilalui dalam upaya pemulihan kembali kesepakatan nuklir tersebut, dalam hal ini Amerika Serikat dibawah pemerintahan presiden Joe Biden untuk kembali menyepakati perjanjian nuklir tahun 2015 bersama dengan negara 5P+1.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Berbicara mengenai kesepakatan nuklir merupakan sesuatu hal yang sangat luas, apalagi tentang perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara 5p+1

⁸ James, N.,(1976).*World Politick:An Introdaction*.New York:The Press. HLM 18

⁹ Paramasatya, S., Wiranto, S. (2019).” *Konfrontasi Amerika Serikat Dan Iran Dalam Joint Chomprehensive Plan Of Action (JCPOA)*” *Jurnal Hubungan Internasional*,Vol 32, hlm 314

yang dimulai sejak masa pemerintahan presiden Barack Obama sampai pada saat Amerika Serikat menarik diri secara sepihak dibawah kepemimpinan presiden Donald Trump. Maka penelitian akan berfokus pada bagaimana pemulihan perjanjian nuklir pada era kepemimpinan baru AS yakni presiden Joe Biden.

1.2.3 Rumusan masalah

Kepemimpinan presiden Donald Trump dengan kebijakan luar negeri nya yang banyak membawa kontroversi di mata masyarakat internasional, terkhusus tentang masalah keluarnya AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada masa kepemimpinannya. Setelah peralihan kepemimpinan baru pada era Joe Biden saat ini maka peneliti akan mencoba menjawab pertanyaan dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana upaya pemulihan kesepakatan nuklir 5P+1 dengan Iran pada era presiden Joe Biden?
2. Apa hambatan dan tantangan dalam proses pemulihan kesepakatan nuklir Iran?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan tercapai pada penelitian ini yaitu untuk mencari peluang pemulihan perjanjian nuklir 5P+1 antara Amerika Serikat pada era presiden Joe Biden.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini yaitu;

- a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hubungan internasional dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis ingin didapatkan dari penelitian adalah penelitian ini bisa menjadi bahan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu.

1.4 Metode Penelitian

3.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang untuk menuangkan gambaran dari sebuah fenomena secara obyektif.¹⁰ Penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif untuk menjelaskan tentang perjanjian nuklir JCPOA dan memberikan gambaran peluang menarik kembali Amerika Serikat untuk kembali pada perjanjian nuklir tersebut pada pemerintahan presiden Joe Biden.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan yang dipakai penulis pada penelitian ini yaitu telaah pustaka (*Library Research*). Penulis tidak melakukan penelitian langsung tetapi menggunakan sumber pustaka untuk mendapatkan data dan informasi. Yaitu

¹⁰ Purba, E.F., & Simanjuntak, P. (2011). *Metode Penelitian*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan, hlm 106.

dengan mengambil data dengan mencari informasi dari sumber literatur yaitu buku, jurnal, majalah, dokumen, makalah, internet dan artikel.

3.4.3 Jenis Data

Penelitian ini memakai data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Data yang didapatkan di peroleh dari tulisan-tulisan ilmiah seperti skripsi, buku-buku, dan tesis.¹¹ Adapun data yang dicari adalah data yang yang mempunyai kaitan langsung dengan penelitian penulis yaitu peluang untuk memulihkan kesepakatan nuklir 5p+1 antara Amerika Serikat dan Iran.

3.4.4 Analisis Data

Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode yang menggambarkan fenomena, kejadian, dinamika sosial, pendapat seseorang dimulai dengan membuat asumsi dan aturan berfikir yang dipakai.¹² Metode kualitatif menggambarkan fenomena melalui kalimat dan lisan.¹³Permasalahan dideskripsikan merujuk pada fakta yang terjadi dan dikolerasikan untuk menarik kesimpulan.

3.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.4.5.1 Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan juli 2023 dan di perkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2023.

¹¹ Ibid, hlm. 107.

¹² Anwar C.I (2021 01 22). Mengenal Penelitian Kualitatif Pengertian dan Metode Analisis, di akses dari tirdo.id, link: <https://tirdo.id.cdn.amproject.org>

¹³ Sahir S,H.,(2022). *Metodologi Penelitian*. Medan:KMB Indonesia, hlm 6

1.4.5.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di tempat domisili peneliti yaitu di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi pada bagian awal dimulai dengan sampul, logo Universitas, nama mahasiswa, nama program studi, fakultas dan universitas. Selanjutnya penelitian yang berjudul **“Prospek Pemulihan Kesepakatan Nulir 5p+1 Antara Amerika Serikat dan Iran”** penelitian ini dituliskan dalam IV bab.

Bab I membahas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II membahas tentang telaah pustaka, argumen utama dan telaah teoretik yaitu gambaran teori-teori atau konsep yang dipakai. Adapun konsep yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Luar Negeri, Rezim Internasioanal dan Nuclear Deterrence.

Bab III pada pada penelitian ini berisi data yang dianggap penting yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat era Joe Biden terkait nuklir Iran, negara 5P+1, Iran, dan upaya pemulihan kesepakatan JCPOA.

Bab IV pada penelitian ini berupa pembahasan yang akan menjelaskan mengenai analisis penulis dengan melihat upaya dan

tantangan pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015 berdasarkan data yang dikumpulkan.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH TEORITIK DAN TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Teoritik

2.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah berupa tindakan atau strategi dilakukan dengan membentuk tujuan dan arah yang dilakukan secara tegas dimana tindakan ini diupayakan oleh wakil-wakil pemerintah yang berdaulat dengan tujuan untuk mempengaruhi kondisi di luar wilayah negara mereka baik aktor pemerintah maupun non pemerintah.¹⁴ Kebijakan luar negeri adalah bentuk interaksi dengan negara lain baik dengan aktor negara maupun non negara demi tercapainya kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri memiliki indikator yang ingin didapatkan, nilai dan juga kebijakan dalam melakukan hubungan dengan negara lain yang dilakukan oleh negara dan pemerintah yang berdaulat.¹⁵ Dua faktor yang berpengaruh dalam menentukan keputusan kebijakan luar negeri dibagi dalam dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor-faktor internal didalamnya adalah politik domestik, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi yang terjadi diluar negara tersebut yang berhubungan langsung dengan negara lain atau adanya campur tangan dari organisasi-organisasi internasional.

¹⁴ Charlsnaes, W., Risse, T., & Simmons B, A. (2004). *Hanbook of International Relation*, London: SAGE publications, hlm 21.

¹⁵ Hutabarat, L. (2005).” *Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Study Hubungan Internasional*”Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 5, hlm 14.

Adapun langkah pertama dari pembuatan kebijakan luar negeri adalah sebagai berikut:

- a) Mempertimbangkan kepentingan nasional secara spesifik
- b) Menentukan faktor situasi yang terjadi dalam lingkungan domestik maupun internasional yang berkaitan dengan indikator yang ingin dicapai dalam kebijakan internasional
- c) Mencari kapabilitas nasional dalam mencapai tujuan yang di inginkan
- d) Meningkatkan strategi untuk mempergunakan kapabilitas yang ada untuk mencegah variable tertentu agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan
- e) Melakukan tindakan
- f) Melihat dan melaksanakan evaluasi yang telah berjalan dalam mencapai tujuan yang di inginkan.¹⁶

Tujuan sebuah negara melakukan kebijakan luar negeri yaitu dengan tujuan mencapai Kepentingan Nasionalnya. Kepentingan Nasional Menurut Donal E. Nuchterlin terbagi menjadi empat bagian yaitu: pertahanan, ekonomi, tata internasional dan kepentingan ideologi.¹⁷

- a) Kepentingan Pertahanan, Diantaranya yaitu untuk dengan tujuan untuk melindungi wilayah dan masyarakatnya dan sistem politik atas intimidasi negara lain.

¹⁶ Jack C, Plano & Olton R, (1999). *Kamus Hubungan Internasional Bandung:Abardin*, hal 5

¹⁷ Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri*, Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS, hlm. 15.

- b) Kepentingan Ekonomi, yaitu keinginan pemerintah demi memajukan ekonomi negaranya dengan cara melakukan kerjasama dengan negara luar.
- c) Tata Internasional, yakni keinginan sebuah negara dalam mempertahankan ataupun menjadikan sistem politik internasional yang membawa manfaat dan keuntungan bagi negaranya.
- d) Kepentingan Ideologi, adalah keinginan untuk mempertahankan negaranya atas ancaman diluar wilayah negara.

Kebijakan Internasional yang merupakan tindakan yang dinyatakan suatu negara dalam menyikapi masalah yang ada pada luar teritorial negara tersebut maka kaitan antara konsep kebijakan luar negeri dan penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada pemerintahan baru dalam menyikapi program nuklir yang dikembangkan Iran. Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara mengakibatkan respon dari negara yang dituju yaitu Iran dan negara-negara yang terlibat yaitu negara 5P+1.

2.1.2 Rezim Internasional

Kerjasama internasional dapat dikakukan dengan adanya rezim internasional. Rezim internasional adalah salah satu cara untuk membentuk kerjasama dan perjanjian antar negara. Adanya rezim internasional merupakan

fasilitas dalam perumusan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan negara anggota. Septhen D Kharsner berpendapat bahwa rezim aturan yang memiliki prinsip aturan dan norma yang merupakan tujuan atau keinginan oleh aktor-aktor yang terlibat.¹⁸

Menurut Oran R. Young rezim internasional merupakan seperangkat aturan, yang mengatur pola interaksi ketika melakukan praktek sosial dalam mengambil keputusan.¹⁹ Adanya Rezim internasional merupakan wadah untuk melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota untuk mencari solusi dari masalah yang mengancam negara terkait.²⁰

Puchala and Hopkins (1982) menjabarkan bahwa ciri utama dalam rezim internasional yaitu:

- a) Rezim mampu membentuk perilaku patuh terhadap norma, prinsip, dan aturan yang berlaku.
- b) Menciptakan prosedur tertentu dalam perumusan kebijakan, seperti mengatur siapa saja yang terlibat, dan aturan yang perlu dipatuhi.
- c) Rezim memiliki norma yang mengikat dan menjelaskan tentang aturan yang benar sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman.

¹⁸ Khasner, S.D.,(1982). *Structural Causes and Regime Consequenses: Regimes as Intervening Variabels*. New York: Cornell University Press, hlm 102.

¹⁹ Prayuda R., Harto, S & Gunawan, D.(2019). "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis", *Jurnal of Diplomacy and Internasioanal Studies*, hlm 108.

²⁰ Ibid, hlm 109.

- d) Rezim melibatkan banyak aktor seperti pemerintah antar negara, organisasi internasional, serta aktor lain, yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan dan mematuhi aturan.
- e) Eksistensi rezim dinilai dengan tercapainya nilai dan indikator, serta proses dari adanya kebijakan dan tercapainya keinginan atau kepentingan dari aktor yang terlibat.

Rezim internasional membuat adanya kesamaan dalam melihat suatu masalah, dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah serta mengatur perilaku negara anggota. Rezim internasional juga melihat kepentingan negara anggotanya sehingga adanya rezim dinilai sebagai wadah yang baik untuk melakukan interaksi satu sama lain.

Rezim internasional merupakan wadah untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota dimana dalam penelitian ini akan membahas masalah kesepakatan nuklir JCPOA atau sering disebut kesepakatan nukli Iran 2015 yang merupakan suatu kesepakatan yang mengatur pengembangan nuklir Iran supaya tidak melebihi batas yang telah ditentukan dengan jaminan pencabutan sanksi dari Amerika Serikat.

2.1.3 Nuclear Deterrence

Nuclear Deterrence adalah strategi yang dilakukan oleh negara yang memiliki persenjataan nuklir untuk mempengaruhi perilaku negara lain yang juga

memiliki senjata nuklir, dengan tujuan untuk mencegah negara lain untuk tidak melakukan tindakan militer tertentu khususnya perang nuklir.²¹ Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa *Nuclear Deterrence* merupakan upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai potensi untuk mengembangkan nuklir untuk mencegah terjadinya perang nuklir.

Istilah *Nuclear Deterrence* pada awalnya muncul ketika adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia diawali dengan adanya senjata atom pada perang dunia II tahun 1945, kemudian dasar-dasar dari deterensi nuklir yaitu kerangka strategis dan operasionalnya ditetapkan pada tahun 1962, bertepatan dengan masa Cuban Missile Crisis atau Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962 hingga saat ini Nuklir Deterrence masih eksis digunakan.²²

Menurut Spiegel syarat yang perlu dicapai setiap negara supaya deterrence maksimal yaitu:

a) Komitmen

Komitmen adalah awal sebuah *deterrence*, dimana negara harus mempunyai komitmen untuk memberikan hukuman bagi negara yang melakukan tindakan serangan. Fungsi dari deterrence akan gagal jika komitmen dari negara ini tidak kuat seperti memberikan hukuman kepada negara penyerang.

²¹ Jhonson, J.L. (1998). *Nuclear Deterrence*, *Encyclopedia of Applied Ethics*, hlm 2.

²² Ramadani N, (2022 06 06), “*Sekilas Nuklir: Teori Deterensi, Proyek Manhattan, dan Energi Terbarukan*” di akses melalui link <https://www.zenius.net/blog/sekilas-nuklir>, diakses pada 14 Maret 2023, Pukul 12.45 WITA.

b) Kapabilitas

Langkah yang kedua adalah negara harus mempunyai kekuatan untuk meyakinkan negara lain bahwa negara bersangkutan memiliki kapabilitas untuk bisa menyerang balik . Fungsi dari deterrens akan lemah jika negara tidak memiliki kapabilitas untuk meyakinkan lawan.

c) Kredibilitas

Syarat yang terakhir yaitu kredibilitas, yaitu negara harus mempunyai masa lalu yang meyakinkan negara lawan. Kredibilas negara memberikan ruang untuk/luntuk tercapainya fungsi deterrence dimana negara tersebut akan membuat negara lain takut untuk melakukan serangan.²³

Dari ketiga syarat tersebut disimpulkan bahwa suatu negara yang ingin mencegah negara lain untuk tidak melakukan ageresi terhadap negara nya maka negara yang bersangkutan harus mempunyai kekuatan untuk meyakinkan negara lawan takut menyerang.

Adapun model dari *Nuclear Deterrence* adalah merasakan adanya ancaman dari negara lain kemudian negara bersangkutan berusaha untuk mengubah rencana negara lawan dengan membarikan ancaman atau pembalasan yang lebih besar dengan tujuan untuk menahan untuk tidak melakukan agresi,

²³ Sinaga O. (2009).” *Kepemilikan Nuklir dan Keamanan Nasional Iran*” Jurnal Sosiohumaniora, Vol 16, hlm 22.

disini negara lawan akan memahami adanya sinyal pembalasan kemudian yang terakhir adalah negara lawan akan memutuskan melakukan penyerang atau tidak.²⁴

Konsep Nuclear Deterrence apabila dikaitkan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan upaya-upaya tindakan Amerika Serikat dan negara eropa lainnya yang memiliki persenjataan nuklir untuk meminimalisir ataupun berupaya untuk menghambat Iran dalam mengembangkan nuklir yang merupakan suatu kekhawatiran Iran akan memproduksi nuklir untuk keperluan senjata dimana nuklir diketahui merupakan senjata pemusnah massal.

2.2 Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian yang berangkat dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini akan berangkat dari beberapa penelitian-penelitian yang membahas masalah yang sama yaitu tentang perjanjian nuklir Iran. Berikut adalah beberapa penelitian yang membahas masalah yang sama

- a) Pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Akbar Kurniadi (2016) yang berjudul **“Kesepakatan Amerika Serikat Menyetujui Joint Plan Of Action (JCPoA) Dengan Iran Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran 2015”**. Penelitian ini membahas tentang alasan AS Menyetujui kesepakatan *Joint Plan of Action* (JCPoA). Sedangkan dalam penelitian ini

²⁴ Brown, A & Arnold, L. (2010). *“The Quirks of Nuclear Deterrens”* Journals Permission, Vol 24, hlm 298.

peneliti akan mencoba untuk mencari peluang kembalinya Amerika Serikat pada perjanjian JCPoA.

- b) Kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Ardylara Mayang Purnama (2018) yang berjudul **“Faktor Pendorong Penarikan Diri Amerika Serikat Dari Perjanjian Nuklir (Joint Chomprehensive Plan of Action) Dengan Iran Pada Tahun 2018”**. Penelitian ini membahas masalah faktor pendorong AS keluar dari perjanjian JCPoA. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas masalah peluang kembalinya Amerika Serikat (AS) untuk kembali pada perjanjian nuklir JCPoA.
- c) Penelitian yang ke tiga yaitu jurnal yang yang di tulis oleh Tiara Angelia (2021) yang berjudul **“Konflik Amerika Serikat dan Iran Studi Kasus: Keluarnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPoA”** Penelitian ini membahas masalah faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat mengubah kebijakannya untuk keluar dari kesepakatan nuklir JCPoA. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan mencoba mencari untuk mencari peluang dan tantangan apa saja dalam hal pemulihan kesepakatan nuklir JCPoA.

Penelitian-penelitian diatas merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas masalah yang sama yang akan dibahas dalam penelitian ini, namun letak perbedaan atau spesifikasi yang membedakan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah mengenai fokus penelitian yaitu dalam penelitian ini

penulis akan fokus pada masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang yaitu mengenai keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada era Donald Trump dan penulis akan mencari peluang dan tantangan pemulihan kesepakatan tersebut pada era presiden Joe Biden.

2.3 Argumen Utama

Penelitian ini fokus pada sebuah kesepakatan nuklir yang disepakati oleh Iran dan negara 5P+1 yang di kenal dengan perjanjian JCPOA. Setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut di bawah pemerintahan presiden Donald Trump pada tahun 2018 membuat hubungan kedua negara ini yaitu Amerika Serikat dan Iran kembali tidak harmonis. Dengan ini membuat Iran kembali memperkuat nuklirnya dan memperkaya uraniumnya. Upaya-upaya yang dilakukan negara yang tergabung dalam dewan keamanan PBB yaitu negara 5P+1 untuk kembalinya Amerika Serikat pada perjanjian nuklir dengan Iran. Untuk melihat apakah ada peluang kembalinya Amerika Serikat untuk menyepakati perjanjian nuklir dengan Iran pada masa pemerintahan presiden yang baru yaitu pemerintahan presiden Joe Biden.

BAB III

SEJARAH HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN IRAN SERTA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA ERA JOE BIDEN DAN UPAYA NEGARA 5P+1 TERHADAP PEMULIHAN KESEPAKATAN NUKLIR IRAN

3.1 Sejarah Hubungan Amerika Serikat Dan Iran Terkait program nuklir Iran

Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1991 menyebabkan munculnya negara-negara lain untuk memiliki senjata nuklir hal ini terjadi karena kekuatan nuklir yang dimiliki oleh kedua negara membuat negara tersebut tidak saling melakukan penyerangan karena kepemilikan senjata nuklir yang dikembangkan oleh kedua negara, hal inilah yang mendorong negara-negara lain lain untuk ikut memiliki senjata nuklir untuk kepentingan negaranya sehingga senjata nuklir bukan hanya dimiliki oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet namun juga dimiliki oleh negara lain. Beberapa negara yang mengembangkan senjata nuklir adalah Prancis India Inggris, Cina, Jerman, Belgia, Pakistan, Belanda, Turki, Italia, Korea Utara hingga Israel deretan negara tersebut merupakan negara yang mengembangkan nuklir secara aktif. Disamping itu ada juga negara yang mengembangkan nuklir untuk tujuan non senjata jumlahnya juga tidak sedikit akan tetapi pengembangan nuklir dari energi menjadi senjata nuklir prosesnya sangat cepat dan mudah.²⁵

²⁵ Sundari R.,(2019).”*Strategi Amerika Serikat Dalam Menekan Pengembangan Nuklir Iran*”
Jurnal Frequency of Internasional Relations , Vol 1, hlm 304.

Salah satu negara yang mengembangkan nuklir untuk tujuan energi adalah Iran. Berdasarkan sejarah pemerintah Iran sudah tertarik untuk mengembangkan nuklir sejak tahun 1953 pada masa pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlevi dimana pada saat itu Iran mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dibawah perjanjian "*atom for peace*" perjanjian tersebut berlanjut pada pemerintahan Iran selanjutnya dengan membangun Universitas Taهران pada tahun 1959 sebagai pusat penelitian nuklir dan resmi didirikan pada tahun 1967. Amerika Serikat juga banyak membantu kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan Iran.

Pada tanggal 1 juli 1968 Iran menandatangani perjanjian NPT (*Non Proliferasi Treaty*) pada itu Iran mengklaim Iran memiliki hak penuh untuk menggunakan dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Selama pemerintahan Resa Pahlevi terjadi ekspansi kapabilitas dan fasilitas penelitian nuklir seperti bantuan Prancis untuk Iran membangun pusat teknologi nuklir di Esfahan pada tahun 1970-an dan juga reaktor-reaktor disuplai dari Cina.²⁶

Seiring berjalannya waktu muncul kecurigaan dari negara-negara lain terkait program nuklir yang dikembangkan Iran bukan untuk Tujuan damai, yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang dulunya mendukung penuh Iran dalam mengembangkan nuklir mulai mengampanyekan dan menuntut Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

²⁶ Ibid.

Pada 15 november 2004 Iran melakukan bekerjasama dengan UE3 yang terdiri dari Prancis, Jerman dan Inggris untuk menandatangani kesepakatan *paris Agreement* dimana isi kesepakatan tersebut adalah Iran akan memperluas penghentian program nuklirnya seperti mengurangi pengayaan uranium dan perakitan alat sentrifugal. Akan tetapi pada mei 2005 Iran mulai melanggar kesepakatan dengan mengembangkan kembali pengayaan uranium di Eshafan karena dengan alasan bahwa Iran memiliki hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Program nuklir Iran tetap dilakukan walaupun dengan banyaknya sanksi yang diberikan PBB dan Amerika Serikat.²⁷

Pada tahun 2006 presiden Mahmud Ahmadinejad melanjutkan program pengayaan uranium Iran namun badan IAEA menuntut untuk pengayaan uranium Iran segera dihentikan namun larangan tersebut tidak dilakukan oleh pihak Iran. Respon Amerika Serikat terhadap Iran beragam dari berbagai pihak wakil presiden Amerika Serikat Dick Cheney menginginkan tindakan militer terhadap Iran melalui serangan udara namun berbeda dengan menteri luar negeri Amerika Serikat yang menginginkan untuk menempuh jalur diplomasi. Akhirnya presiden George W. Bush memilih tindakan dengan memata-matai Iran dan diperkirakan Iran akan mampu menghasilkan senjata nuklir antara tahun 2010 dan 2015. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sekutu Amerika Serikat di kawasan yaitu Israel yang secara geografis dekat dengan Iran maka Israel menginginkan agar Amerika Serikat melakukan serangan militer terhadap Iran. Namun hal tersebut masih menjadi pertimbangan oleh pemerintah Amerika Serikat karena cara militer

²⁷ Ibid.

dianggap bukan cara yang mudah dimana cara ini mengorbankan banyak prajurit dan sisi finansial.

Upaya Amerika Serikat untuk menekan Iran menghentikan program nuklirnya yaitu dengan cara memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran yaitu dengan melarang ekspor minyak Iran masuk ke Amerika Serikat dan juga melarang lembaga keuangan Amerika Serikat bekerja sama dengan bank sentral Iran. Januari 2012 Uni Eropa juga melarang Iran untuk melakukan ekspor minyak ke Eropa namun Iran sudah terlebih dahulu menghentikan ekport minyak ke Inggris, Yunani dan Prancis hal ini menjadi serangan balik bagi Uni Eropa karena dampak yang diakibatkan penghentian ekspor minyak Iran ke Eropa berdampak pada masyarakat yang membawa pengaruh terhadap harga minyak di Eropa.

Usaha Amerika Serikat tidak berhenti begitu saja Amerika Serikat juga mengirim pasukannya dengan mendirikan pangkalan militer di timur tengah dengan pangkalan terbanyak di perbatasan Iran dengan tujuan sebagai basis pengawas terhadap Iran. Alasan mengapa Amerika Serikat menempatkan sebagian besar pangkalan militernya di timur tengah adalah mengamankan sumber daya minyak, dan juga menjamin keamanan terhadap Israel dan ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat. Apalagi dengan adanya ancaman Iran untuk menutup selat Hormuz jika sanksi masi diberlakukan terhadap negaranya. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi distribusi minyak di seluruh dunia termasuk hambatan distirubusi minyak yang masuk ke Amerika Serikat.²⁸

²⁸ Ibid.

Peralihan pemerintahan dari George Bush ke masa pemerintahan Barack Obama IAEA kembali menemukan pengembangan nuklir Iran, namun pengembangan yang dilakukan oleh Iran masi dengan tujuan damai. Untuk memperoleh solusi dari masalah yang terjadi antara dua negara presiden presiden Barack Obama melakukan upaya diplomasi terhadap Iran terkait program nuklirnya namun upaya tersebut tidak mendapatkan respon dari presiden Ahamad Dinejad pada kala itu. Menanggapi isu nuklir Iran Barack Obama sering menghubungi presiden Iran untuk menunjukkan sikap serius untuk negosiasi namun tidak ada respon dari pihak Iran.²⁹

Sebelum adanya kelanjutan dari sengketa kedua negara terkait nuklir Iran. Iran pada saat itu sudah melakukan pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum dengan presiden terpilih adalah Hasan Rouhani. Pemerintahan Hasan Rouhani membawa Iran pada kebijakan luar negeri yang baru yaitu dengan memperbaiki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dengan tujuan perbaikan perekonomian dan pemberantasan terorisme. Hal ini tentu saja mendapatkan respon baik dari presiden Barack Obama. Hasan Rouhani melakukan perundingan dengan negara 5P+1 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia dan Jerman pada 26 september 2013 setelah negosiasi tersebut Iran sudah mulai melakukan transparansi program

²⁹ Rachmadiani A.,(2010). "*Kebijakan Luar negeri Iran Terhadap Amerika Serikat Mengenai Isu Nuklir Pada Masa Hasan Rouhani*". Jurnal Unej, Vol 46, hlm 3.

nuklirnya dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan untuk mendapatkan kepercayaan dunia.³⁰

Putaran kedua pada tanggal 13-15 oktober di Janewa pada perundingan tersebut Amerika Serikat menawarkan keringanan sanksi terhadap Iran yaitu mengenalkan bisnis baru kepada Iran dengan perusahaan-perusahaan Iran yaitu bisnis minyak, emas otomotif dan arsitektur selain itu Iran juga kembali menerima bantuan dana dan devisa yang diblokir Amerika Serikat.³¹

Pada juni 2015 Iran dan negara 5P+1 menandatangani kesepakatan yang tertuang dalam JCPOA (*Joint Comprehensive Plan Of Action*) poin-poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah Iran hanya boleh melakukan pengayaan uranium hingga 20% dan dibatasi alat pengayaan nuklirnya yang kedua adalah IAEA mempunyai akses penuh untuk mengawasi program nuklir Iran dan sebagai imbalan apabila Iran bersedia untuk mematuhi adalah Uni Eropa dan Amerika Serikat akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran.³² Tercapainya kesepakatan nuklir Iran dibawah pemerintahan Hasan Rouhani merupakan sesuatu pencapaian yang di anggap mustahil karena Iran yang merupakan negara yang tertutup namun hal ini berbeda pada masa pemerintahan Rouhani Iran dapat mencapai kesepakatan nuklir dengan kelompok negara 5P+1 melalui jalur diplomasi. Dampak yang dirasakan Iran setelah pencabutan sanksi ekonomi terhadap

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Mahdi, I.,(2016).”*Analisa Kebijakan Amerika Serikat, Cina, dan Rusia Dalam Kesepakatan Nuklir Iran*” *The Journal of Islamic Studies and International Relation*,Vol 42, hlm 77.

negaranya adalah hubungan yang baik terjalin antara kelompok negara 5P+1 dengan Iran khususnya hubungannya dengan Amerika Serikat.

Peralihan pemerintahan Amerika Serikat dari Obama ke kepemimpinan Donald Trump membawa kebijakan baru terkait nuklir Iran. Pada tanggal 8 Mei 2018 Amerika Serikat secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir Iran dan kembali memberikan sanksi kepada Iran. Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut merupakan tindakan yang tidak melibatkan pihak lain yang merupakan negara penandatangan yaitu negara kelompok 5+1 lainnya. Meskipun kesepakatan JCPOA dianggap belum sempurna namun kesepakatan tersebut merupakan cara terbaik untuk mengendalikan Iran dalam produksi nuklirnya. Meskipun Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari negara sekutunya di Timur Tengah namun isu keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan mendapatkan kecaman dari pihak negara lain yang terlibat.³³

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait pengembangan nuklir Iran pasca keluarnya dari JCPOA adalah memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran dengan tujuan untuk penekanan terhadap Iran khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu sektor yang menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat adalah pada sektor minyak bumi yang mengalami penurunan dan mengakibatkan sumber pendapatan Iran berkurang sehingga hal ini akan memengaruhi kemampuan Iran untuk mencapai tujuannya.³⁴

³³ Wiranto S, & Paramasatya, S.,(2019). "Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)" Jurnal Hubungan Internasional, Vol 42, hlm 298

³⁴ Ibid.

Setelah masa pemerintahan Presiden Donald Trum berakhir pada tanggal 20 Januari 2021. Kepemimpinan Amerika Serikat di ambil alih oleh Joe Biden sebagai pemimpin Amerika Serikat baru.

3.2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Joe Biden Terhadap Pemulihan Kesepakatan Nuklir Iran

Keterlibatan kepentingan nasional dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri dalam menjalin hubungan dengan negara harus memahami cita-cita dan strategi.³⁵ Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat penting untuk mengetahui berbagai pihak yang berperan penting dalam perumusan kebijakan luar negerinya. Contohnya pada era pemerintahan presiden Joe Biden, Antony Blinken selaku penasehat kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mempunyai prinsip yang sama dengan Joe Biden yaitu internasionalisme liberal yang mendukung kemanusiaan, hak asasi manusia, demokrasi dan hukum internasional. Masa kepemimpinan Joe Biden keterlibatan penasehat kebijakan luar negerinya akan menjadi penentu arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam satu dekade.³⁶

Kepemimpinan Joe Biden lebih mengutamakan keringanan sebagai resolusi sebagaimana dalam landasan utama kebijakan luar negerinya yaitu multilateralisme, seperti tertuang dalam pidato kemenangannya bahwa Amerika

³⁵Jackson, R, & Sorensen, S.,(2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional* Yogyakarta:Pustaka Belajar, hlm 439.

³⁶ Nurtyandini, R.T. (2022). "Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Joe Biden Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran" *Jurnal PIR*, Vol 6, hlm 144.

Serikat akan menjadi pemimpin bagi negara-negara berdaulat dalam menghadapi ancaman internasional.³⁷

Sesuai pernyataan Joe Biden yang menyatakan bahwa hubungan Amerika Serikat secara multilateral dan bilateral sudah rusak dan berjanji akan kembali memperbaikinya secepat mungkin. Mengenai hubungannya dengan Iran setelah presiden Donald Trum menarik diri dari kesepakatan JCPOA maka hal ini akan memberikan tantangan dalam kepemimpinannya.³⁸ Sudah sejak lama Biden ingin kembali bergabung dalam kesepakatan tersebut dengan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Iran dengan tujuan untuk kembali pada kesepakatan nuklir JCPOA, namun Iran tidak akan mudah kembali percaya dengan keinginan Amerika tersebut.³⁹

Pemulihan kesepakatan nuklir Iran akan membawa tantangan baru di era kepemimpinan Joe Biden, salah satunya adalah usaha Iran untuk bangkit kembali terhadap usaha pemulihan ekonominya pasca sanksi ekonomi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump dan mulai mengabaikan batasan kesepakatan JCPOA. Kepemimpinan Joe Biden mengecam dan menganggap bahwa tindakan Donald Trum keluar dari kesepakatan JCPOA adalah tindakan sembrono yang akan membuat Iran lebih mengembangkan nuklir melebihi batas.⁴⁰

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Alamsyah, R.N.,(2022).”Kelanjutan Pengembangan Nuklir Iran di Era Pemerintahan Baru Amerika Serikat” Jurnal PIR, Vol 14, hlm 172.

⁴⁰ Warrick, J.,& Gearan , A. (2023 04 05), “ *Biden Telah Berjanji Untuk Segera Memulihkan Kesepakatan Nuklir Iran*” Diakses dari <https://www.washingtonpost-com.tranlate.goog>, Diakses pada 05 Juli 2023, pukul 12.30 WITA.

Pada tanggal 30 oktober 2021 presiden Joe Biden dan tiga pemimpin Eropa lainnya melakukan pertemuan untuk membahas tentang program nuklir Iran. Mereka mengirim sinyal kepada Iran bahwa ada kesiapan untuk kembali ke kesepakatan JCPOA. Keyakinan bahwa Amerika Serikat dapat kembali bergabung dan patuh terhadap peraturan yang sudah ada dan memastikan bahwa program nuklir Iran adalah untuk tujuan damai.⁴¹

Kesiapan Joe Biden membawa Amerika Serikat siap untuk berunding kembali dengan Iran terkait kesepakatan nuklir JCPOA, sebagai mana diungkapkan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Akan tetapi Iran belum menunjukkan reaksinya akan hal itu. Penekanan kesepakatan nuklir ini dilakukan dengan negara-negara 5+1 lainnya yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Tiongkok, dan Rusia dengan mendesak pemerintahan baru AS yaitu Joe Biden untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran yang telah diberlakukan oleh Donald Trum. Jika hal ini tidak digubris maka Iran mengancam akan kembali melanggar kesepakatan dan tidak memberi tahu program mereka dengan kata lain tidak mengizinkan Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA) untuk mengawasi program nuklirnya.⁴²

Dalam pidato presiden Joe Biden pada tanggal 21 desember 2022 mengatakan bahwa terkait program nuklir akan lebih mengutamakan negosiasi termasuk pada rezim non proliferasi. Kemudian pada konferensi pers di Rose

⁴¹ Alamsyah , Op.cit.

⁴² Utomo, S, B.,(2023 04 05) “*Cabut Sanksi AS Siap Berunding dengan Iran*” Diakses dari <https://koran-jakarta.com/cabut-sanksi-as-siap-berunding-dengan-iran?page=all>, Diakses pada 05 juli 2023, Pukul 13.00 WITA.

Garden pada tanggal 16 april 2021 Joe Biden mengatakan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran untuk terus memperkaya uraniumnya hingga 60% dimana hal itu bertentangan dengan kesepakatan JCPOA yang menurutnya tidak seharusnya ditinggalkan, hal yang sama juga disampaikan pada pidato konferensi keamanan Munich pada 19 Februari 2021 yang mengatakan bahwa AS siap untuk bergabung dan melakukan negosiasi dengan kelompok negara 5P+1 tentang program nuklir Iran terkait ancaman proliferasi nuklir yang menurutnya membutuhkan diplomasi.⁴³

Janji Joe Biden untuk bergabung kembali pada kesepakatan nuklir Iran dianggap tidak mudah untuk ditepati seperti yang disampaikan oleh menteri luar negeri Antony Blinken bahwa Iran bisa saja memiliki bahan nuklir yang cukup untuk sebuah bom dan terorisme Iran kembali mengancam dengan penargetan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat dan Israel di seluruh dunia. Selanjutnya adalah tantangan terhadap kepercayaan Iran pada kesepakatan tersebut menurun 85% menjadi 42% pada oktober 2019 pasca keluarnya AS secara sepihak pada pemerintahan Trum dengan ini Iran meminta Amerika Serikat untuk membebaskan sanksi tanpa syarat dimana hal tersebut ditolak oleh pemerintahan Biden, namun jika sanksi tersebut dicabut belum tentu akan cukup untuk memperbaiki ekonomi Iran pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) menyusut hingga 6,8% dan sektor minyak bumi hingga 38%. Hingga saat ini menghentikan proliferasi nuklir Iran bukan menjadi prioritas utama dibandingkan kebijakan luar negeri lainnya seperti mengatasi perubahan

⁴³ Nada, G. (2023 05 14). "Joe Biden di Iran" diakses melalui link <https://iranprimer-usip-org.translate.google.com/blog/2020/nov09/joe-biden-iran>, Diakses pada 05 juli 2023, pukul 13.05 WITA.

iklim, membebaskan kebangkitan China, dan Revanchisme Rusia. Terlepas dari itu Iran mendapat dukungan dari China dan Rusia untuk mendesak Amerika Serikat kembali ke kesepakatan tanpa syarat.⁴⁴

Meskipun program nuklir Iran tidak dianggap sebagai prioritas utama Biden namun upaya Biden untuk melakukan negosiasi dengan Iran terkait program nuklirnya masih terlihat hal ini terlihat pada pertemuannya dengan perdana menteri Israel yakni Yair Lapid pada tanggal 13 Juli 2022 setelah melakukan pembicaraan pribadi mengenai nuklir Iran Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menunggu lama terhadap respon Iran terkait pemulihan kesepakatan JCPoA dan sebagai jalan terakhir bisa saja Amerika Serikat menggunakan kekerasan untuk penekanan jika diperlukan namun disamping itu Biden akan tetap melakukan upaya diplomasi sebagai cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keinginan Joe Biden untuk menempuh jalan diplomasi rupanya berbanding terbalik dengan pandangan perdana menteri Israel yang menganggap bahwa menurutnya dibutuhkan ancaman militer untuk menekan Iran, dalam hal ini juga para pejabat Israel berupaya untuk mendorong pemerintahan Joe Biden untuk tidak kembali pada kesepakatan tersebut dimana dari awal Israel menentang kesepakatan nuklir 2015 yang menganggap kesepakatan tersebut tidak membahas program rudal balistik dan aktivitas nuklir

⁴⁴ Cohen,S,R.,(23 05 04) “*Mengapa Biden Tidak Dapat Memutar Balik Jam pada Kesepakatan Nuklir Iran*” di akses melalui link <https://www.rand-org.translate.google/blog/2021/03/why-biden-cant-trun-back-the-clok-on-the-iran-nuclear.html?>, dIakses pada 06 juli 2023, pukul 14.30 WITA.

Iran di wilayah timur tengah. Israel lebih memilih sanksi tegas dengan harapan menghasilkan kesepakatan yang lebih luas.⁴⁵

Upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara 5P+1 yang merupakan kekuatan utama, rupanya memiliki tantangan untuk mencapainya seperti yang disampaikan oleh seorang pejabat senior Amerika Serikat yang mengatakan bahwa peluangnya sangat rendah setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat di Doha. Negosiator sudah hampir mencapai kesepakatan baru namun permintaan Iran agar Washington menghapus IRGC (Korps Pengawal Revolusi Islam) dari daftar kelompok terorisme dianggap diluar cakupan untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015.⁴⁶

Hubungan Amerika Serikat dan Iran terlihat semakin memanas dengan terjadinya insiden penangkapan seorang warga Amerika Serikat yang dianggap sebagai mata-mata oleh Iran pada tanggal 20 juli 2022, hal ini disampaikan oleh seorang aktivis lingkungan hidup melalui stasiun televisi yang mengajukan permohonan kepada presiden Joe Biden untuk segera membebaskan tahanan tersebut dimana kasus penahanan warga Amerika Serikat tersebut dianggap sebagai alat tawar politik.⁴⁷

⁴⁵ Madhani, A, Boak, J, & Magerian, C.,(2023 05 04) "*Biden Mengatakan Tidak Akan Menunggu Lama untuk Iran dalam Kesepakatan Nuklir*" di akses melalui link <https://www-pbs-org.translate.google.com/newshour/politics/biden-says-u-s-will-not-wait-forever-for-iran-onn-nuclear-deal/>, Diakses pada 06 Juli 2023, Pukul 15.00 WITA.

⁴⁶ Sinaga, Y, A.,(2023 04 05). "*Biden: Kekuatan Adalah Upaya Terakhir Cegah Iran Dari Senjata Nuklir*" di akses melalui link <https://www.antaraneews.com/berita/2995417/biden-kekuatan-adalah-upaya-terakhir-cegah-iran-dari-senjata-nuklir> , Diakses pada 06 Juli 2023, Pukul 15.04 WITA.

⁴⁷ Reuters.,(2023 04 07). "*Warga Amerika Serikat Yang Dipenjara Iran Minta Minta Biden Bantu Pembebasannya*" di akses melalui link <https://www.voaindonesia.com/a/warga-as-yang-dipenjara>

3.3 Respon Iran Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Di dalam hubungan internasional akan terjadi yang disebut aksi dan reaksi, begitupun dengan respon Iran terhadap kebijakan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Joe Biden terhadap program nuklir yang dikembangkannya.

Pada awal pemilihan presiden Amerika Serikat, Hassan Rouhani selaku presiden yang menjabat pada saat itu mengatakan bahwa baginya tidak penting siapa yang terpilih menjadi presiden namun yang terpenting adalah bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat patuh terhadap hukum internasional, dimana menurutnya negaranya tidak seharusnya menjadi sasaran sanksi. Iran tetap tidak akan malakukan negosiasi kecuali Amerika Serikat kembali patuh terhadap kesepakatan awal.⁴⁸

Hasan Rouhani selaku presiden Iran berupaya meminta kepada presiden Joe Biden untuk kembali pada kesepakatan nuklir JCPoA dan mencabut sanksi terhadap negaranya yang dijatuhkan Donald Trump. Sesuai pernyataannya bahwa jika Amerika Serikat kembali pada kesepakatan JCPoA maka Iran juga akan kembali patuh terhadap kesepakatan yang telah ada.⁴⁹

Menjelang pergantian kepemimpinan Iran ancaman Iran pun mulai muncul terhadap pemerintahan Joe Biden yang disampaikan oleh menteri luar negeri Iran

iran-minta-biden-bantu-pembebasannya/6998905.html/ext-commens, diakses pada 07 Juli 2023, Pukul 15.30 WITA.

⁴⁸ Suwanti.,(2023 04 07). "Presiden Iran: yang penting kebijakan Amerika Serikat bukan soal siapa presidennya" di akses melalui link <https://www.antarnews.com/berita/1820812/presiden-iran-yang-penting-kebijakan-as-bukan-soal-siapa-presidennya>, diakses pada 07 Juli 2023, Pukul 08.00.

⁴⁹ CNN Indonesia.,(2021 01 20). "Presiden Iran Minta Biden Kembali ke Perjanjian Nuklir" di akses melalui link <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210120183139-120-596320/presiden-iran-minta-biden-kembali-ke-perjanjian-nuklir>, diakses pada 07 Juli 2023, Pukul 08.11 WITA.

Mohammad Javad Zarif pada tanggal 21 Februari 2021, dimana Iran akan melakukan pergantian kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang kelompok garis keras yang mungkin akan mengambil tindakan tegas terhadap Amerika Serikat jika masih saja memberlakukan sanksi sebagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh Donald Trump.⁵⁰

Respon Iran terhadap kunjungan presiden Amerika Serikat ke timur tengah yang membahas tentang isu regional dan global dengan Israel dimana pertemuan tersebut juga membahas tentang nuklir Iran. Pertemuan itu ditanggapi oleh presiden Iran yaitu Ebrahim Raisi bahwa pertemuan tersebut tidak akan membawa perdamaian bagi Israel, menurut Raisi Amerika Serikat berupaya membantu Israel untuk mengajak negara lain untuk menormalisasi hubungan diplomatik negaranya namun hal itu tidak akan tercapai dengan cara apa pun karena upaya Amerika Serikat dalam yaitu membantu Israel tidak akan terlepas dari pantauan Iran di kawasan timur tengah, dimana keamanan di kawasan tersebut hanya akan tercapai dengan kerjasama antara negara-negara di kawasan bukan dengan bantuan negara lain.⁵¹

Keberlangsungan negosiasi tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat sempat mengalami kemajuan namun pemerintahan Biden enggan untuk mengonfirmasi kelanjutan dari kritik yang dilakukan Joe Biden terhadap

⁵⁰Tim Seputar Tangsel.,(2021 07 02). “*Memanas, Joe Biden Diancam Iran Jika Tak Selesaikan Perjanjian*” di akses melalui link <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-141395654/memanas-joe-biden-ancaman-iran-ke-as-jika-tak-selesaikan-perjanjian>, diakses pada 07 Juli 2023, Pukul 08.30 WITA.

⁵¹ Maharani, E.,(2022 07 15). “*Kunjungan Biden tak Bawa Keamanan Bagi Israel*” di akses melalui link <https://internasional.republika.co.id/berita/rezyx335/presiden-iran-kunjungan-biden-takbawa-keamanan-bagi-israel>, diakses pada 09 Juli 2023, Pada Pukul 19.00 WITA.

pemerintahan sebelumnya, kurangnya tingkat kepercayaan Iran terhadap pemerintahan baru Amerika Serikat mendorong delegasi Iran dalam negosiasi Wina untuk menerima jaminan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan baru Amerika Serikat tidak akan melakukan penarikan diri secara sepihak seperti yang dilakukan oleh kepemimpinan Donald Trump.

3.4 Upaya Negosiasi Terhadap Pemulihan Kesepakatan Nuklir JCPoA 2015

Kedua negara yang terlibat yaitu Amerika Serikat dan Iran dalam hal melakukan upaya pemulihan kesepakatan nuklir JCPoA menempuh jalur negosiasi secara tidak langsung dengan tujuan untuk menemukan titik temu antara perbedaan yang menjadi penghambat pemulihan kesepakatan nuklir JCPoA.

3.4.1 Pembicaraan wina

Upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir JCPoA antara kedua negara yakni Amerika Serikat dan Iran ditandai dengan adanya negosiasi yang berlangsung di Wina dimana Australia sebagai mediator dalam pembicaraan ini. Pembicaraan ini sudah dilakukan sejak april 2021 dimana Amerika Serikat sudah dipimpin oleh presiden Joe Biden pada saat itu kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 juni 2021, Iran masih bersikeras Amerika Serikat harus segera mengambil keputusan untuk mencabut sanksi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negaranya pada masa pemerintahan Donald Trump dan juga pada negosiasi tersebut Amerika Serikat melontarkan persyaratan agar Iran segera membatasi program nuklirnya.

Pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir Iran 2015 dilanjutkan pada 29 november 2021 setelah jeda selama lima bulan dalam pembicaraan ini Amerika Serikat berpartisipasi secara tidak langsung seperti pada pembicaraan sebelumnya. Proses perundingan yang berlangsung lama bisa saja membuat Iran semakin melakukan kemajuan terhadap pengayaan uranium yang dikhawatirkan Amerika Serikat.⁵² Pada desember 2021 Iran mengajukan permintaan untuk pembicaraan selanjutnya fokus pada sanksi minyak.

Setelah libur tahun baru pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir Iran kembali dilaksanakan pada bulan januari 2022 dalam pembicaraan itu akan dilakukan diskusi yang lebih mendalam dengan harapan mencapai kesepakatan yang lebih memungkinkan.⁵³ Namun Presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi yang dilantik pada bulan juni memberikan komentar terkait pembicaraan yang berlangsung di Wina itu bahwa Iran tidak pernah berharap lebih pada pada pembicaraan tersebut dimana Raisi akan lebih mengandalkan potensi domestik dibandingkan mengandalkan upaya negosiasi tersebut.⁵⁴

Pembicaraan yang sempat tertunda dilanjutkan di Doha Qatar pada bulan Juni 2022 dimana Qatar dipilih sebagai mediator karena Qatar mempunyai

⁵² VOA.,(2021 11 29)"Pembicaraan Mengenai Kesepakatan Nuklir Iran Dimulai Kembali di Wina" di akses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pembicaraan-mengenai-kesepakatan-nuklir-iran-dimulai-kembali-di-wina/6331698.html>,diakses pada 09 Juli 2023, pada Pukul 20.00 WITA.

⁵³ VOA.,(2022 01 04)."Iran: Pembicaraan Nuklir Dilanjutkan di Wina" di akses melalui link <https://elshinta.com/news-mitra/916/2022/01/04/iran-pembicaraan-nuklir-dilanjutkan-di-wina>,Diakses pada 09 Juli 2023, pada pukul 20.23 WITA

⁵⁴ VOI.,(2022 02 11)."Soal Perundingan Nuklir, Presiden Iran:Kami Tidak Pernah Memiliki Harapan di Wina dan New York"di akses melalui <https://voi.id/berita/134040/soal-perundingan-nuklir-presiden-iran-kami-tidak-pernah-memiliki-harapan-di-wina-dan-new-york>,diakses pada 09 Juli 2023, pada pukul 21.10 WITA.

hubungan baik dengan kedua negara Iran dan Amerika Serikat namun pada pembicaraan yang berlangsung di Doha Qatar berakhir tanpa adanya kemajuan.⁵⁵

Lanjutan pembicaraan nuklir Iran kembali dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2022 setelah tertunda dari bulan maret 2022 pembicaraan ini berlanjut setelah badan pengawas nuklir internasional melaporkan Iran perluas pengayaan uraniumnya. Pembicaraan tersebut tidak melibatkan semua negara penandatangan kesepakatan nuklir Iran 2015 yaitu negara 5P+1 dan juga Amerika Serikat tidak berpartisipasi atau bernegosiasi secara langsung seperti pada pembicaraan-pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui pembicaraan tersebut Iran mengajukan dua syarat yaitu pertama Amerika Serikat harus menghilangkan Garda Revolusi paramiliternya dari daftar sebagai organisasi teroris, dan yang kedua adalah Iran akan mengaktifkan kembali kamera pengawas Badan Energi Atom Internasional yang dimatikan jika upaya barat dihentikan dalam menyelidiki uranium buatan manusia yang dirahasiakan oleh Iran. Syarat tersebut dianggap menyulitkan perundingan baru.⁵⁶

Tiga poin utama yang menghambat tercapainya kesepakatan Wina adalah

1. Iran menyingkirkan kamera pengawas IAEA yang memantau jejak uranium Iran.

⁵⁵ Gambel, J.,(2022 06 30). " *Pembicaraan nuklir Iran-AS di Qatar Berakhir Tanpa Kemajuan*" di akses melalui link <https://apnews-com.traslate.google.com/article/politics-iran-emirates>, diakses 10 Juli 2023, pukul 22.00.

⁵⁶ DW.,(2022 08 05). " *Negosiasi Nuklir Berlanjut, Iran Perluas Pengayaan Uranium*" di akses melalui link <https://www.dw.com/id/negosiasi-nuklir-berlanjut-saat-iranperluas-pengayaan-uranium/a-62718263>,diakses 10 Juli 2023, pukul 22.10 WITA.

2. Kurangnya kepercayaan Iran terhadap pemerintahan baru Amerika Serikat untuk patuh terhadap kesepakatan yang sudah ada.
3. Permintaan Iran untuk Amerika Serikat menghapus IRGC dari daftar teroris yang sejauh ini ditolak oleh Amerika Serikat.⁵⁷

Uni Eropa memberikan usulan sebagai rancangan final terhadap upaya pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015 dimana rancangan tersebut menjanjikan keringanan sanksi terhadap Iran sebagai imbalan apabila bersedia mengurangi program nuklirnya, namun Iran beranggapan bahwa pembicaraan tersebut belum pada tahap final kesepakatan, disamping itu Amerika Serikat juga akan memberikan tanggapan tersendiri kepada Uni Eropa dan juga melabeli tanggapan Iran sebagai hal yang tidak konstruktif.⁵⁸

3.4.2 Negosiasi Iran dengan IAEA

Pengembangan energi nuklir dapat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai sumber energi dan juga dapat diproduksi menjadi senjata, terdirinya IAEA pada tahun 1957 karena adanya kekhawatiran terhadap pengembangan nuklir menjadi senjata pemusnah massal, upaya IAEA untuk

⁵⁷ DW.,(2022 08 16). "*Iran Kirim Proposal atas Rancangan Kesepakatan Nuklir*" di akses melalui <https://www.dw.com/iran/-kirim-proposal-atas-rancangan-kesepakatan-ue/a-62819006>, diakses pada 10 Juli 2023, Pukul 22.40 WITA.

⁵⁸ DW.,(2022 08 09). "*Konsultasi Nuklir: Iran Pelajari Usulan Uni Eropa*" di akses melalui link <https://amp.dw.com/id/konsultasi-nuklir-iran-pelajari-usulan-uni-eropa>, diakses pada 11 Juli 2023, Pukul 23.09 WITA.

mencegah pengembangan energi nuklir menjadi senjata maka IAEA melakukan kampanye penggunaan nuklir untuk tujuan damai.⁵⁹

Iran sebagai negara yang mempunyai sumber energi nuklir telah menandatangani protokol pada tahun 2003 sebagai upaya membangun kepercayaan terhadap pengembangan program nuklirnya meskipun seringkali mendapatkan tuduhan dari negara barat akan pengembangan nuklir Iran yang bertujuan untuk pengembangan senjata pemusnah massal.⁶⁰ Sebagai bentuk kekhawatiran negara barat terhadap pengembangan nuklir Iran maka pada tahun 2015 dibentuklah kesepakatan JCPoA yang ditandatangani oleh negara 5P+1 yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat dan Jerman, salah satu isi garis besarnya adalah IAEA sebagai badan pengawas nuklir internasional mempunyai akses untuk mengawasi program nuklir Iran.

Pemerintahan Donald Trump membawa Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran dan memberlakukan sanksi maka Iran mulai mengembangkan energi nuklir melebihi batas yang telah disepakati.

Selain upaya untuk pembicaraan pemulihan nuklir Iran yang berlangsung di Wina badan pengawas nuklir IAEA juga seringkali mengeluarkan laporan tentang pengembangan nuklir Iran yang melebihi batas dan mendekati tingkat senjata dengan ini IAEA berupaya melakukan negosiasi dengan Iran terkait program nuklirnya.

⁵⁹ Akbar, H.,(2018). "*Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasinya kepada IAEA*" Jurnal Hubungan Internasional, Vol 6, hlm 10.

⁶⁰ Ibid.



Sumber:voi.id

Setelah badan pengawas nuklir PBB yaitu IAEA kembali melaporkan akan tingkat pengayaan uranium Iran yang sudah mendekati tingkat pembuatan senjata dimana pada april 2021 Iran melakukan pengayaan uranium hingga kemurnian 60% dan pada bulan Februari 2023 meningkat hingga 84% yang diproduksi di dua lokasi .menurut tetimologi IAEA jumlah uranium 42 kg tidak bisa dikesampingkan.⁶¹

Upaya Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melakukan kunjungan ke Iran dengan tujuan untuk menyelidikan jejak-jejak uranium yang ditemukan pada lokasi yang berbeda kunjungan tersebut dilakukan oleh Rafael Gross pada tanggal 3 Maret 2023 dengan harapan pertemuan dengan presiden Iran Ebrahim Raisi

⁶¹ Reuters.,(2023 03 01). “Laporan IAEA:Sedang Berlangsung.Diskusi Soal Iran Perkaya Uranium Mendekati Tingkat Senjata” diakses melalui <https://voaindonesia.com/a/laporan-iaea-sedang-berlangsung-diskusi-soal-iran-perkaya-uranium-mendekati-tingkat-senjata>,Diakses 12 Juli 2023, Pukul 22.30 WITA.

dapat membantu dalam hal memuluskan hambatan pemulihan kesepakatan JCPOA.⁶² Rafael Grossi mengatakan:

“ini pertama kali saya melakukan percakapan serius tentang hal-hal ini dengan presiden Iran. Ini sangat penting. ini bukan janji-janji, kami membuat kesepakatan yang kongkret”.⁶³

Juru bicara Iran mengatakan bahwa kunjungan Rafael Grossi dianggap sebagai kerja sama baru antara kedua belah pihak yang merupakan hubungan diplomatik yang positif dan mencapai banyak kesepakatan yang baik dalam kunjungan ini Iran telah berkomitmen untuk membantu aktivitas pengawasan yang tertunda dan perakitan alat-alat pengawas yang telah dihapuskan sebelumnya dan juga Iran siap untuk memberikan hak pendekatan informasi.⁶⁴

3.5 Peranan Negara 4P+1 Dalam Upaya Pemulihan Kesepakatan Nuklir Iran

Upaya negara barat untuk meminimalisir pengembangan nuklir Iran pasca keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir JCPOA pada tahun 2018 yang menjadi faktor pendorong Iran untuk mengembangkan uranium sampai mendekati kadar pembuatan senjata sebagai respon atas sanksi yang diberikan Amerika Serikat. Kekhawatiran negara-negara barat terhadap program nuklir Iran membuat negara-negara yang sebelumnya menjadi negara penandatangan kesepakatan

⁶² Pramudyani, Y, D.,(2023 03 04).”Kepala IAEA Dorong Iran Kooperatif dalam Penyelidikan Jejak Uranium” di akses melalui <https://www.antarnews.com/berita/kepada-iaea-dorong-iran-kooperatif-dalam-penyelidikan-jejak-uranium>, Diakses pada 13 Juli 2023, Pukul 17.00 WITA.

⁶³ Associated Press.,(2023 03 09).”Jelang Pertemuan di Wina, Iran Setuju Kerja Sama Dengan IAEA” di akses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/jelang-pertemuan-di-wina-iran-setju-kerjasama-dengan-iaea>, Diakses pada 13 Juli 2023, Pukul 19.20 WITA.

⁶⁴ VOV.word.,(2023 03 07).”Peluang untuk Pemulihan Kesepakatan Nuklir Iran)” di akses melalui link <https://m.vovword.vn/id-ID/ulasan/berita/peluang-untuk-memulihkan-kesepakatan-nuklir-iran-1181202.vov>,diakses pada 13 Juli 2023, Pukul 20.00 WITA.

nuklir Iran 2015 yaitu negara 5P+1 untuk berupaya menghidupkan kembali kesepakatan tersebut. Berikut adalah peranan negara-negara dalam upaya pemulihan nuklir Iran 2015:

3.5.1 Rusia

Sejak tahun 1995 hubungan bilateral Rusia dan Iran berlangsung baik yaitu dengan memberikan dukungan dan bantuan kepada Iran dalam mengembangkan reaktor nuklir, namun hal tersebut mendapatkan kecaman dari negara barat dan mendesak Rusia untuk berhenti memberikan bantuan kepada Iran, pada masa pemerintahan Obama Amerika Serikat menekan Rusia untuk mengurangi bantuan teknologi nuklir terhadap Iran bahkan mendesak agar menghentikan perjanjian antara Iran dan Rusia. Amerika Serikat dan Rusia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pengembangan nuklir yang dilakukan Iran. Amerika Serikat menganggap bahwa Iran merupakan ancaman dan bisa saja mengembangkan nuklir untuk diproduksi menjadi senjata pemusnah massal sedangkan Rusia menganggap bahwa Iran masih jauh dari proses pengembangan senjata nuklir.⁶⁵

Rusia yang merupakan negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan Iran dibandingkan dengan negara Eropa lainnya sering kali melakukan lobi dengan Iran sebelum sanksi DK PBB untuk menggunakan hak veto nya namun Rusia tetap setuju untuk memberikan sanksi terhadap Iran karena

⁶⁵ Akbar, Z.E.,(2015). "*Kepentingan Rusia Dibalik Dukungannya Terhadap Program Nuklir Iran*" Jurnal Hubungan Internasional. Vol 6, Hlm 6.

tidak ingin mengambil resiko dengan tuduhan dianggap sebagai negara yang ada dibelakang program nuklir Iran.

Terlepas dari posisi Rusia saat ini kepentingan Rusia terhadap pengembangan nuklir Iran cukup kuat yaitu mencari sekutu apabila suatu saat terjadi perang maka Rusia sudah mempunyai sekutu yaitu Iran dalam hal meningkatkan keamanan militer.⁶⁶

Rusia merupakan negara yang masuk dalam anggota dewan keamanan PBB yang merupakan negara penandatangan kesepakatan nuklir JCPoA pada tahun 2015. Setelah keluarnya Amerika Serikat pada kesepakatan tersebut maka keterlibatan Rusia terhadap upaya pemulihan kesepakatan nuklir Iran terlihat sebagai bentuk dari upaya untuk mencegah Iran agar meminimalisir program pengayaan uranium yang dikhawatirkan digunakan untuk kepentingan militer.

Peranan Rusia dalam proses pemulihan kesepakatan JCPoA terlihat dari keterlibatannya dalam pembicaraan yang berlangsung lama di Wina terkait pemuliharaan kesepakatan nuklir Iran 2015. Rusia meminta supaya pembicaraan tersebut mencakup jaminan bahwa setiap aktifitas bisnis Rusia pada masa depan dengan Iran dilepaskan dari sanksi Amerika Serikat. Akibat dari permintaan Rusia tersebut pembicaraan sempat terhenti untuk memungkinkan diplomasi bilateral Rusia dan Iran.⁶⁷

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Liechtensen, S.,(2022 03 10).”*Pembicaraan Nuklir Iran Hampir Runtuh Karena Perjanjian Rusia*”.diakses melalui <https://www-politico-eu./article/iran-nuclear--talks-close-to-collapse-over-russian-demans>,diakses 14 Juli 2023, Pukul 16.00 WITA.

Pada masa pemerintahan Joe Biden Amerika Serikat mendesak Rusia untuk bekerjasama dengan dalam bidang pengendalian senjata nuklir dan meminta Rusia untuk menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam pembicaraan tentang pemulihan kesepakatan nuklir.⁶⁸

Selain dari hubungan Iran dan Rusia kunjungan presiden Putin ke Iran pada tahun 2022 mengonfirmasi tentang dugaan Amerika Serikat bahwa Iran memasok drone ke Rusia dalam kepentingan perang ukraina, namun Iran mengatakan bahwa kerjasamanya dengan Rusia sudah berlangsung lama sebelum terjadinya perang tanpa menyangkal pernyataan Amerika Serikat.



Sumber: onthermosway.eu

⁶⁸ Hermansah.,(2022 08 01). "AS Siap bernegosiasi Dengan Rusia Tentang Pengendalian Senjata Nuklir". diakses melalui link <https://www.alinea.id/dunia/as-siap-bernegosiasi-dengan-rusia-tentang-senjata-nuklir>, diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 16.10 WITA.

Gambar diatas menunjukan jalur koridor perdagangan baru antara Rusia dan Iran. Ditengah meningkatnya sanksi ekonomi terhadap Iran hubungan kerjasama perdagangan dengan Rusia menciptakan keringanan terhadap ekonomi Iran dan Rusia melihat Iran sebagai potensi penyedia senjata menawarkan kerjasama untuk menghindari sanksi dan ekspor minyak.⁶⁹

Sebelum perang Ukraina berlangsung dukungan Rusia terhadap pemulihan kesepakatan nuklir Iran, Rusia dengan aktif mendukung proses pemulihan namun setelah invasi Rusia terhadap ukraina berlangsung Rusia kembali pada posisi netral karena Rusia mulai bergantung pada Iran dalam mencari dukungan ekonomi dan perang. Ketergantungan Rusia terhadap Iran menyebabkan Rusia tidak terlalu mendukung terhadap proses pemulihan kesepakatan nuklir Iran dan mulai mengurangi bantuan kepada barat dalam upaya negosiasi pemulihan kesepakatan nuklir Iran dan jika kesepakatan tersebut mati kemungkinan Rusia akan melindungi Iran dari segala konsekuensi.⁷⁰

Disamping itu negosiasi yang berlangsung membawa kekhawatiran terhadap Rusia karena kesepakatan tersebut akan membawa Iran kembali menjual minyak mentah kepasar global dan mengimbangi pasar minyak dan juga akan ada

⁶⁹ Ghaedi,M.,(2022 07 19). "*Kunjungi Taheran Putin Tingkatkan Kerja Sama dengan Iran*" di akses melalui <https://www.dw.com/id/kunjungi-taheran-putin-tingkatkan-kerja-sama-dengan-iran>, diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 21.00 WITA.

⁷⁰ Notte,H.,(2022 11 03). "*Jangan Harapkan Lebih Banyak Bantuan Rusia Untuk Kesepakatan Nuklir Iran*" di akses melalui <https://warontherocks-com.translate.google.com/2022/11/dont-expect-any-more-russian-help-on-the-iran-nuclear-deal>, diakses pada 15 Juli 2023, Pukul 09.00 WITA.

batasan harga jika barat memberikan sanksi terhadap Rusia karena invasi Ukraina dan larangan untuk menjual minyak mentah.⁷¹

3.5.2 China

Kepentingan nasional China terhadap pengembangan nuklir Iran sudah terlihat dari masa kepemimpinan Hu Jintao dengan memberikan bantuan tenaga ahli dan material yang dapat membantu Iran dalam pengembangan nuklirnya, hal ini dilakukan China guna mendapatkan kepentingan nasional dalam memenuhi kebutuhan minyaknya yang dimiliki oleh Iran, dan Iran akan menjamin kebutuhan gas selama 25 tahun dimulai pada tahun 2004.⁷²

Kepentingan China di Iran lebih didominasi oleh faktor ekonomi dan juga untuk mengimbangi kekuatan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Disamping itu Iran juga dianggap lebih menguntungkan apabila melakukan relasi yang baik sebab Iran mempunyai kekuatan yang besar di kawasan Timur Tengah.⁷³

China sebagai negara penandatangan kesepakatan nuklir Iran 2015 menurut Dengli Shen adalah yang pertama menghormati Iran dalam penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai, yang kedua adalah mendukung rezim non-

⁷¹ Liechtenstein, S.,(2022 03 05). “Rusia Memblokir Kesepakatan Nuklir Iran Karena Kremlin Resah Atas Pendapatan Minyaknya” di akses melalui <https://www-politico-eu-tranlate-goog-article/russia-obstucts-iran-nuclear-deal-as-the-kremlin-frets-over-oil-income>, diakses pada 15 Juli 09.30 WITA.

⁷² Cristiani, a.,(2018). “Dukungan Tiongkok Terhadap Pengembangan Nuklir di Iran Pada Masa Pemerintahan Hu Jintao”. Jurnal Global Political Studies, Vol 2,Hlm 67.

⁷³ Opcit hlm 83

profesi termasuk Iran yang menandatangani NPT dan memelihara hubungan bilateral yang telah dibangun dengan Iran.⁷⁴

Sampai saat ini China mempunyai peranan penting dalam proses pemulihan kesepakatan nuklir Iran. China juga menyambut baik dijalankannya perundingan kembali yang dilaksanakan di Wina.

Dukungan China terhadap Iran dalam isu nuklir dapat dilihat dalam negosiasi yang berlangsung di Wina dimana China mendesak pihak lain supaya tetap berkomitmen pada pembicaraan. China tetap menganggap hubungannya dengan Iran bersifat jangka panjang untuk kemajuan kedua negara dan juga menyatakan dukungan terhadap Iran dalam menjaga kedaulatan nasionalnya.⁷⁵

3.5.3 Prancis

Pasca keluarnya Amerika Serikat secara sepihak dari kesepakatan nuklir JCPOA pada tahun 2018 Prancis sebagai negara penandatangan kesepakatan tersebut mendesak Iran agar mematuhi kesepakatan nuklir dan tidak melanggar kesepakatan tersebut karena Iran telah bertindak dengan merebut kapal tanker berbendera Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan Eropa. Prancis akan mencoba untuk berinisiatif dengan negara Eropa lainnya yaitu Inggris dan Jerman untuk memberikan tekanan terhadap Iran.⁷⁶

⁷⁴ Opcit hlm 83

⁷⁵ Pramudyani, Y.D.,(2023 01 21).”China Tegaskan Dukungan untuk Iran dala Isu Nukli” diakses melalui link <https://m.antaranews.com/berita/3359289/china-tegaskan-dukkungan-untuk-iran-dalam-isu-nuklir>, diakses pada 16 Juli 2023, Pukul 20.30 WITA.

⁷⁶ Aini,N.,(2019 0724).” Prancis:Iran Harus Patuhi Kesepakatan Nuklir” diakses melalui link <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/eropa/19/07/24/pv4w9838-prancis-iran-harus-patuhi-kesepakatan-nuklir?>, diakses pada 16 Juli 2023, Pukul 21.00 WITA.

Prancis juga mendesak Amerika Serikat agar segera kembali ke kesepakatan nuklir Iran dimana Prancis menganggap bahwa tekanan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran justru akan menjadi ancaman karena Iran akan memperoleh kapasitas senjata nuklir sebagai bentuk pelanggaran terhadap JCPOA.⁷⁷ Sebagai negara penandatangan kesepakatan nuklir Iran, Prancis juga berperan penting dalam upaya pemulihan kesepakatan tersebut.

Pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir di Wina yang tidak mengalami kemajuan membuat Prancis kecewa karena presiden Iran tidak kunjung memberikan pilihan yang jelas dan juga atas tindakan Iran menyingkirkan peralatan pemantauan yang dipasang di beberapa titik untuk memantau program nuklir Iran.⁷⁸

3.5.4 Inggris

Sebagai negara yang ikut serta dalam menandatangani kesepakatan nuklir Iran 2015 maka peranan Inggris dalam upaya pemulihan kesepakatan juga mendesak Amerika Serikat dan Iran agar kembali kepada kesepakatan tersebut. Pertemuan yang melibatkan perdana menteri Inggris, perdana menteri Prancis,

⁷⁷ Maulana, V.,(2021 01 17).” *Prancis Desak AS dan Iran Kembali Ke Kesepakatan Nuklir*” diakses melalui link <https://internasional.sindonews.com/read/304420/41/prancis-desakas-dan-iran-kembali-ke-kesepakatan-nuklir>, diakses pada 16 Juli 2023, Pukul 21.10 WITA.

⁷⁸ Sunyoto, M.,(2022 07 24). “*Prancis Nyatakan Kecewa Atas Ketiadaan Kemajuan Perjanjian Nuklir Iran*” di akses melalui link <https://www.antaranews.com/berita/3015245/prancis-nyatakan-kecewa-atas-ketiadaan-kemajuan-perjanjian-nuklir-iran>, diakses pada 16 Juli 2023, pukul 23.00 WITA.

Jerman dan juga melibatkan presiden Joe Biden membicarakan tentang respon Iran mengenai menghidupkan kembali pembicaraan kesepakatan nuklir.⁷⁹

3.5.5 Jerman

Jerman juga sebagai negara yang mengambil peranan dalam proses pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015 yaitu dengan menyerukan pihak-pihak yang terlibat untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir JCPOA.

Jerman memiliki kepentingan ekonomi yang besar terhadap Iran dan sangat ingin mempertahankan kesepakatan nuklir agar investasinya tidak terganggu. Oleh karena itu, Jerman secara aktif terlibat dalam upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir dengan Iran, termasuk dengan mengusulkan alternatif bagi sanksi AS dan menekankan pentingnya diplomasi dan dialog.

⁷⁹ CNN.,(2022 08 22). "AS, Inggris, Prancis, dan Jerman Bicarakan Kesepakatan Nuklir Iran" di akses melalui link <https://www.cnnindonesia.com/internasional/as-inggris-prancis-dan-jerman-bicarakan-kesepakatan-nuklir-iran>, diakses pada 16 Juli 2023, pukul 23.15 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri*, Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS
- Charlsnaes, W., Risse, T., & Simmons B, A. (2004). *Hanbook of International Relation*, London: SAGE publications
- Jack C, Plano & Olton R, (1999). *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung:Abardin
- Jhonson, J,L. (1998). *Nuclier Deterrence*, Encyclopedia of Applied Etnics
- Jackson, R, & Sorensen , S.,(2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional* Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Purba, E.F.,& Simanjuntak, P. (2011). *Metode Penelitian*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Sahir S,H.,(2022). *Metodologi Penelitian*. Medan:KMB Indonesia
- James, N.,(1976).*World Politick:An Introdaction*. New York:The Press
- Khasner, S,D.,(1982). *Structural Causes and Regime Consequenses: Regimes as Intervening Variabels*. New York: Cornell University Press

SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI

- Akbar, H.,(2018).Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasinya kepada IAEA. *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 6, 8-18
- Akbar, Z,E.,(2015). Kepentingan Rusia Dibalik Dukungannya Terhadap Program Nuklir Iran. *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 6, 1-11
- Alamsyah, R,N.,(2022). Kelanjutan Pengembangan Nuklir Iran di Era Pemerintahan Baru Amerika Serikat. *Jurnal PIR*, Volume 6, 163-174
- Brown, A & Arnold, L. (2010). The Quirks of Nuclear Detterens, *Journals Permission*, Volume 24, 294-311.
- Budianto, K. (2016). Kebijakan Luar Negeri Iran Menyepakati Perjanjian The Joint Comprehensive Plant of Action (JCPOA) Dalam

- Pembatasan Program Nuklir Iran 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume 14, 1-11
- Cristiani, a.,(2018). Dukungan Tiongkok Terhadap Pengembangan Nuklir di Iran Pada Masa Pemerintahan Hu Jintao. *Jurnal Global Political Studies*, Volume 2, 62-73
- Garjito,M.C.F. (2019). Analisis Kasus Keputusan Presiden Donald Trump Keluar Dari JCPOA.*Jurnal hubungan internasional*. Volume 7, 5.
- Hengkey, S.C. (2021). Diplomasi Amerika Serikat Tentang Perjanjian Nuklir Dalam Pembentukan Joint Comprehensive Plan Of Action Dengan Iran Tahun 2013-2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 9, 107-117.
- Hutabarat, L. (2005). Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Study Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 5, 13-22.
- Karima, I. (2018). Penandatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) oleh Iran tahun 2015. *Jurnal analisis*, Volume 7, 237-249
- Kurniadi, A. (2016). *Kesepakatan Amerika Serikat Menyetujui Joint Plan Of Action (JCPOA) Dengan Iran Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran 2015*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahdi, I.,(2016). Analisis Kebijakan Amerika Serikat, Cina, dan Rusia Dalam Kesepakatan Nuklir Iran. *The Journal of Islamic Studies and International Relation*, Volume, 42, 1-12
- Mikail, K & Fhathoni, A. (2019) Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran, *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, Volume 3, 1-16
- Nurtyandini, R,T. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Joe Biden Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran, *Jurnal PIR*, Volume 6, 140-151
- Paramasatya, S., Wiranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat Dan Iran Dalam Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) *SJurnal Hubungan Internasional*, Volume 32, 297-313
- Purwanto,A.J. (2011). Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional, *Jurnal Ilmu Politik dan Hubungan Internasional*, Volume 6, 1-9

- Rachmadiantai A.,(2010). Kebijakan Luar negeri Iran Terhadap Amerika Serikat Mengenai Isu Nuklir Pada Masa Hasan Rouhani. *Jurnal Unej*, Volume 46, 1-15
- Sinaga O. (2009). Kepemilikan Nuklir dan Keamanan Nasional Iran. *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 16, 17-34
- Sundari R.,(2013). *Wacana Program Nuklir Iran Sebagai Upaya Deterrence terhadap Amerika Serikat*. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada
- Sundari R.,(2019). Strategi Amerika Serikat Dalam Menekan Pengembangan Nuklir Iran. *Jurnal Frequency of Internasional Relations*, Volume 1, 310-315
- Wiranto S, & Paramasatya, S.,(2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 42, 297- 313
- Yustiningrum, E.RR. (2017). Masalah Senjata Nuklir Dan Masa Depan Perdamaian Dunia, Volume 7, *Jurnal Politik*, 1-16

SUMBER WEBSITE

- Aini,N.,(2023/107 03). *Prancis:Iran Harus Patuhi Kesepakatan Nuklir*. di akses melalui link <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/eropa/19/07/24/pv4w9838-prancis-iran-harus-patuhi-kesepakatan-nuklir?>
- Anwar C.I . (2022, 06 04). *Mengenal Penelitian Kualitatif Pengertian dan Metode Analisis*. di akses dari Tirido.id, link: <https://tirido.id.cdn.amproject.org>.
- Associated Press.,(2023 06 09). *Jelang Pertemuan di Wina, Iran Setuju Kerja Sama Dengan IAEA*. di akses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/jelang-pertemuan-di-wina-iran-setju-kerjasama-dengan-iaea>
- CNN Indonesia.,(2023, 07 05). *Presiden Iran Minta Biden Kembali ke Perjanjian Nuklir*. di akses melalui link <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210120183139-120-596320/presiden-iran-minta-biden-kembali-ke-perjanjian-nuklir>
- CNN.,(2023 07 08). *AS, Inggris, Prancis, dan Jerman Bicarakan Kesepakatan Nuklir Iran*. di akses melalui link <https://www.cnnindonesia.com/internasional/as-inggris-prancis-dan-jerman-bicarakan-kesepakatan-nuklir-iran>

- Cohen,S,R.,(23 05 04) .*Mengapa Biden Tidak Dapat Memutar Balik Jam pada Kesepakatan Nuklir Iran.* di akses melalui link/[1https://www-rand-org.translate.goog/blog/2021/03/why-biden-cant-trun-back-the-clok-on-the-iran-nuclear.html](https://www-rand-org.translate.goog/blog/2021/03/why-biden-cant-trun-back-the-clok-on-the-iran-nuclear.html)
- DW.,(2023 06 09). *Konsultasi Nuklir:Iran Pelajari Usulan Uni Eropa.*di akses melalui link <https://amp.dw.com/id/konsultasi-nuklir-iran-pelajari-usulan-uni-eropa>
- DW.,(2023 07 01). *Iran Kirim Proposal atas Rancangan Kesepakatan Nuklir.*di akses melalui <https://www.dw.com/iran/-kirim-proposal-atas-rancangan-kesepakatan-nuklir-ue/a-62819006>
- DW.,(2023 07 07). *Negosiasi Nuklir Berlanjut, Iran Perluas Pengayaan Uranium.* di akses melalui link <https://www.dw.com/id/negosiasi-nuklir-berlanjut-saat-iranperluas-pengayaan-uranium/a-62718263>
- Gambel, J.,(2023 07 05). *Pembicaraan nuklir Iran-AS di Qatar Berakhir Tanpa Kemajuan.* di akses melalui link <https://apnews-com.translate.goog/article/politics-iran-emirates>
- Ghaedi,M.,(2023 07 11). *Kunjungi Taheran Putin Tingkatkan Kerja Sama dengan Iran.*di akses melalui <https://www.dw.com/id/kunjungi-taheran-putin-tingkatkan-kerja-sama-dengan-iran>
- Hermansah.,(2022 08 01).”*AS/ISiap bernegosiasi Dengan Rusia Tentang Pengendalian Senjata Nuklir*”. di akses melalui link <https://www.alinea.id/dunia/as-siap-bernegosiasi-dengan-rusia-tentang-senjata-nuklir>
- Liechtensen, S.,(2023 06 10). *Pembicaraan Nuklir Iran Hampir Runtuh Karena Perjanjian Rusia* .di akses melalui <https://www-politico-eu./article/iran-nuclear--talks-close-to-collapse-over-russian-demans>
- Liechtenstein, S.,(2023 07 05). *Rusia Memblokir Kesepakatan Nuklir Iran Karena Kremlin Resah Atas Pendapatan Minyaknya.*di akses melalui <https://www-politico-eu-tranlate-goog-article/russia-obstucts-iran-nuclear-deal-as-the-kremlin-frets-over-oil-income>
- Madhani, A, Boak, J, & Magerian, C.,(2023 05 04).*Biden Mengatakan Tidak Akan Menunggu Lama untuk Iran dalam Kesepakatan Nukli.* di akses melalui link/[1https://www-pbs-org.translate.goog/newshour/politics/biden-says-u-s-will-not-wait-forever-for-iran-onn-nuclear-deal](https://www-pbs-org.translate.goog/newshour/politics/biden-says-u-s-will-not-wait-forever-for-iran-onn-nuclear-deal)

- Maharani, E.,(2023 07 15). *Kunjungan Biden tak Bawa Keamanan Bagi Israel*. di akses melalui link <https://internasional.republika.co.id/berita/rezyx335/presiden-iran-kunjungan-biden-takbawa-keamanan-bagi-israel>
- Maulana, V.,(2023 07 13). *Prancis Desak AS dan Iran Kembali Ke Kesepakatan Nuklir*.di akses melalui link <https://internasional.sindonews.com/read/304420/41/prancis-desakas-dan-iran-kembali-ke-kesepakatan-nuklir>
- Nada, G. (2023 05 14)./1*Joe Biden di Iran*. diakses melalui link <https://iranprimer-usip-org.translate.goog/blog/2020/nov09/joe-biden-iran>
- Notte,H.,(2023 07 03). *Jangan Harapkan Lebih Banyak Bantuan Rusia Untuk Kesepakatan Nuklir Iran*. di akses melalui <https://warontherocks-com.translate.goog/2022/11/dont-expect-any-more-russian-help-on-the-iran-nuclear-deal>
- Pramudyani, Y, D.,(2023 07 04). *Kepala IAEA Dorong Iran Kooperatif dalam Penyelidikan Jejak Uranium*. di akses melalui <https://www.antarnews.com/berita/kepala-iaea-dorong-iran-kooperatif-dalam-penyelidikan-jejak-uranium>
- Pramudyani, Y,D.,(2023 06 21).*China Tegaskan Dukungan untuk Iran dala Isu Nukli*. di akses melalui link <https://m.antarnews.com/berita/3359289/china-tegaskan-dukungan-untuk-iran-dalam-isu-nuklir>
- Reuters.,(2023 06 29). *Warga Amerika Serikat Yang Dipenjara Iran Minta Minta Biden Bantu Pembebasannya*. di akses melalui link <https://www.voaindonesia.com/a/warga-as-yang-dipenjara-iran-minta-biden-bantu-pembebasannya/6998905.html/#ext-commens>
- Reuters.,(2023 07 01). *Laporan IAEA:Sedang Berlangsung.Diskusi Soal Iran Perkaya Uranium Mendekati Tingkat Senjata*. di akses melalui <https://.voaindonesia.com/a/laporan-iaea-sedang-berlangsung-diskusi-soal-iran-perkaya-uranium-mendekati-tingkat-senjata>
- Sinaga, Y, A.,(2023 04 05). *Biden: Kekuatan Adalah Upaya Terakhir Cegah Iran Dari Senjata Nuklir*. di akses melalui link <https://www.antarnews.com/berita/2995417/biden-kekuatan-adalah-upaya-terakhir-cegah-iran-dari-senjata-nuklir>
- Sunyoto, M.,(2023 07 06). *Prancis Nyatakan Kecewa Atas Ketiadaan Kemajuan Perjanjian Nuklir Iran*. di akses melalui link

<https://www.antarnews.com/berita/3015245/prancis-nyatakan-kecewa-atas-ketiadaan-kemajuan-perjanjian-nuklir-iran>

Suwanti.,(2023 07 07). *Presiden Iran:yang penting kebijakan Amerika Serikat bukan soal siapa presidennya.* di akses melalui link <https://www.antarnews.com/berita/1820812/presiden-iran-yang-penting-kebijakan-as-bukan-soal-siapa-presidennya>

Tim Seputar Tangsel.,(2023 07 02). *Memanas, Joe Biden Diancam Iran Jika Tak Selesaikan Perjanjian.* di akses melalui link <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-141395654/memanas-joe-biden-ancaman-iran-ke-as-jika-tak-selesaikan-perjanjian>

Utomo, S, B.,(2023 04 05) .*Cabut Sanksi AS Siap Berunding dengan Iran.* di akses melalui link <https://koran-jakarta.com/cabut-sanksi-as-siap-berunding-dengan-iran?page=all>

VOA.,(2023 06 28).*Pembicaraan Mengenai Kesepakatan Nuklir Iran Dimulai Kembali di Wina.* di akses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pembicaraan-mengenai-kesepakatan-nuklir-iran-dimulai-kembali-di-wina/6331698.html>

VOA.,(2023 07 09). *Iran: Pembicaraan Nuklir Dilanjutkan di Wina.* di akses melalui link <https://elshinta.com/news-mitra/916/2022/01/04/iran-pembicaraan-nuklir-dilanjutkan-di-wina>

VOI.,(2023 07 11). *Soal Perundingan Nuklir, Presiden Iran:Kami Tidak Pernah Memiliki Harapan di Wina dan New York.*di akses melalui <https://voi.id/berita/134040/soal-perundingan-nuklir-presiden-iran-kami-tidak-pernah-memiliki-harapan-di-wina-dan-new-york>

VOV.word.,(2023 07 07). *Peluang untuk Pemulihan Kesepakatan Nuklir Iran.* di akses/1melalui link <https://m.vovword.vn/id-ID/ulasan/berita/peluang-untuk-memulihkan-kesepakatan-nuklir-iran-1181202.vov>

Warrick, J.,& Gearan , A. (2023 04 05), *Biden Telah Berjanji Untuk Segera Memulihkan Kesepakatan Nuklir Iran.* di akses melalui link <https://www-washingtonpost-com.tranlate.goog>